

**EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA  
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN  
FISIK DI DESA BUNTUNA KECAMATAN BAOLAN**

*EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN EFFORTS TO  
IMPROVE DEVELOPMENT PHYSICS IN THE BUNTUNA VILLAGE, BAOLAN  
DISTRICT*

**Mirayanti<sup>1</sup>, Fiansi<sup>2</sup>**

Universitas Madako<sup>1,2</sup>

Email: Fak.Ekonomi.mira1403@gmail.com<sup>1</sup>, Fak.Ekonomi.fiansi87@gmail.com<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengeksplorasi efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa buntuna, kabupaten baolan, kabupaten tolitoli. (2) untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa buntuna, kabupaten baolan, kabupaten tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan dana desa belum dilakukan secara efektif karena tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa dengan memprioritaskan transparansi informasi kepada masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan, (2) ada faktor yang menghambat efektivitas dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di desa buntuna, kabupaten baolan, kabupaten tolitoli yaitu sumber daya manusia dan teknologi informasi yang tidak memadai.

**Kata Kunci** : **efektivitas, dana desa, pembangunan**

**ABSTRACT**

*The aims of this research are : (1) to explore the effectiveness management of village fund allocation in increasing physical development in buntuna village, baolan district, tolitoli regency. (2) to find out what factors are inhibiting the effectiveness management of village fund allocation in increasing physical development in buntuna village, baolan district, tolitoli regency. This study uses a qualitative description research method. The results show that : (1) village fund management has not been carried out effectively because it is not in accordance with the principles of village fund management with prioritizes transparency of information to the community in every activity carried out, (2) there are factors which inhibit effectiveness in the management village funds in enhancing physical development in village buntuna, baolan district, tolitoli regency namely inadequate human resources and information technology.*

**Keywords** : **effectiveness, village funds, development**

## PENDAHULUAN

Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi politik yang perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah. Oleh karena itu dalam menunjang sebuah pembangunan nasional, maka pembangunan di daerah merupakan hal yang tidak terpisahkan dimana pembangunan daerah tersebut harus dibangun dari terwujudnya pembangunan di desa. Desa memiliki hak asal usul tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, desa telah berkembang dan mengalami metamorfosa dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat, adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 sangat jelas di atur tentang pemerintahan desa yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa menjadi pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa bertugas sebagai lembaga pengawas atas kebijakan dan peraturan di desa. Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang perlu untuk dijabarkan tentang anggaran dan pendapatan belanja desa. Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa, seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan asli desa yang lain yang sah.

Desa Buntuna kecamatan Baolan kabupaten Tolitoli adalah desa yang letaknya sangat dekat dari ibukota kabupaten. Letak yang sangat dekat tersebut menjadi

kan masyarakat desa hidup dengan pola hidup yang hampir rata rata selayaknya masyarakat yang ada dikota. Masyarakat desa kemudian akan memiliki keinginan yang beragam terhadap apa yang akan desa berikan dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa dalam pembangunan didesa, khususnya pada pembangunan fisik yang dampaknya akan dirasakan secara langsung bagi masyarakat. Desa akan menyiapkan sarana dan prasaran dalam pengalokasian dana desa yang harus dipenuhi yang merujuk kepada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian pemerintah desa harus lebih memiliki motivasi yang lebih dalam menyusun dan menyalurkan dana desa dengan baik sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan efektif dan efisien

Berdasarkan pada fenomena diatas , maka seharusnya seluruh perangkat pemerintahan desa dapat mengoptimalkan anggaran dana desa untuk terciptanya pergerakan yang lebih pada roda perekonomian yang nantinya akan membawa pada pembangunan didesa yang semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian dengan judul "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik diDesa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli"

## METODE PENELITIAN

Untuk menjawab dua permasalahan dalam penelitian ini maka teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dimana analisis ini adalah proses penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan pelaku yang dapat diamati.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Buntuna Kecamatan Baolan

Pengelolaan dana desa dalam pembangunan fisik di Desa Buntuna Kecamatan Baolan merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran dana desa untuk keperluan pembangunan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi hal ini diperuntukan untk kesejahteraan masyarakat di desa buntuna agar dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-

program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

**Tahap perencanaan pengelolaan desa**

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Buntuna Kecamatan Baolan, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan dengan model partisipatif dalam kegiatan musrembang. Tim pelaksanaan pengelolaan dana desa dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional kegiatan (PJOK), seker-taris desa selaku penanggung jawab administrasi (PJAK), bendahara desa selaku kepala urusan keuangan (KUK) dan dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa. Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui musrenbang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat desa.

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan musrenbang dalam tahapan perencanaan di Desa Buntuna Kecamatan Baolan masih sebatas kepada memenuhi ketentuan dan belum menyentuh kepada esensi yang terkandung dari maksud kegiatan musrenbang desa, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi (Orang)	Persentase
	Kehadiran	Hadir	Hadir	19
Tidak hadir		Tidak hadir	10	34,48
<b>Total</b>		<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>100</b>
Pokok Bahasan		Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran	12
	Penyusunan Rencana	Penyusunan Rencana	6	20,68
	Tidak tahu	Tidak tahu	11	37,94
	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>100</b>
Hasil Narasumber	Tersusunnya DURK	Tersusunnya DURK	3	10,34
	Belum tersusunnya DURK	Belum tersusunnya DURK	19	65,52
	Tidak tahu	Tidak tahu	7	24,14
	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>100</b>
Sosialisasi DURK kepada masyarakat	Ada	Ada	3	10,34
	Tidak ada	Tidak ada	19	72,41
	Tidak tahu	Tidak tahu	7	24,14
	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>100</b>

Sumber : Desa Buntuna

Dari table diatas, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah, kondisi tersebut ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah masyarakat yang hadir maupun yang menyampaikan aspirasi/pendapat dalam musrembang dengan kegiatan yang akan dilakukan. Dari 29 responden kalangan masyarakat, sebanyak 19 orang atau 65,52 % yang menghadiri kegiatan musrembang desa tersebut, dan sebagian dari yang hadir ada yg tidak menyampaikan aspirasi/usulan rencana kegiatan. Sedangkan 10 orang atau 34,48 % lainnya tidak hadir.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada Kepala Desa Buntuna yaitu Ibu Tryana mengenai tahapan Perencanaan pengelolaan dana desa dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang, yaitu sebagai berikut:

“Dalam proses musrembang yang dilakukan masyarakat masih tergolong rendah dalam berpartisipasi. Masyarakat yang hadir dan berpartisipasi hanya sedikit dari total masyarakat yang diundang, dari jumlah yang hadir kebanyakan adalah pemerintah desa terkait ditambah lagi tidak memberikan aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrembang desa sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri juga kepedulian terhadap desa itu sangat rendah.”

Selanjutnya Tabel diatas juga menunjukkan bahwa dalam proses musrembang desa pemerintah kurang transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dari 29 responden, hanya 6 orang atau 20,68 % yang mengatakan bahwa dalam musrembang yang dibahas terkait rencana kegiatan yang boleh dilakukan, sebanyak 12 orang atau 41,38 % lainnya mengatakan bahwa dalam musrembang desa hanya sekedar memberikan informasi terkait jumlah anggaran yang diterima oleh desa dan sisanya sebanyak 11 orang atau 37,94 % mengatakan tidak tahu. Informasi ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat yaitu bapak Eman Wahyudi yang mengatakan bahwa:

“kami masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, di tambah lagi pemerintah desa juga tidak detail menelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya

pribadi dan sejumlah masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir, karena memang kami tidak tahu harus bicara apa”.

kondisi tersebut menyebabkan kegiatan musrembang desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Buntuna tidak berjalan dengan baik, terbukti tidak adanya rencana kegiatan yang tersusun. Dalam tabel di atas terlihat bahwa 29 orang responden, seluruh responden yang hadir yaitu sebanyak 19 atau 65,52 % sependapat bahwa tidak ada Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang di hasilkan. Sedangkan dari 10 orang yang tidak hadir dalam kegiatan musrenbang ada yang menjawab mengetahui tentang rencana kegiatan yang diusulkan dan 7 orang responden lainnya atau 24,14 % mengatakan tidak tahu sebab mereka tidak menghadiri kegiatan musrembang yang bertujuan untuk mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Buntuna.

Oleh karena itu, secara keseluruhan proses perencanaan kegiatan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Buntuna yang tertuang dalam DURK tersebut ditentukan secara pribadi sesuai dengan kaca mata pemerintah desa terkait hal apa saja yang dibutuhkan oleh pemerintah desa selaku tim pelaksana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Buntuna. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD Buntuna, yaitu bapak Moh Rafiq lahabe yang menyatakan bahwa:

“Kegiatan musrembang desa yang harusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran dana desa tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, namun masyarakat yang hadir tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa dan masyarakat hanya mengiyakan, baik perencanaan pembuatan jalan, pagar, drainase maupun pembangunan fisik lainnya yang kemudian nantinya akan digunakan juga oleh masyarakat.

Penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa seperti hasil wawancara di atas tidaklah menjadi masalah, apabila rencana yang tertuang da-

lam DURK kembali di informasikan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat guna meminta tanggapan masyarakat. Akan tetapi, dari tabel di atas terlihat bahwa dari 29 orang total responden hanya 3 orang atau 10,34 % mengatakan bahwa DURK di informasikan kepada masyarakat, sebanyak 19 orang atau 65,51% mengatakan bahwa tidak ada informasi terkait DURK dan sisanya sebanyak 7 orang atau 24,14 % mengatakan tidak tahu. Berikut hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Ibu Susanti yang mengatakan bahwa:

“Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Buntuna ini memang diputuskan bersama pada saat musrenbang tapi selanjutnya tidak pernah disampaikan oleh pemerintah desa secara resmi kepada masyarakat. Akan tetapi masyarakat mengetahui ketika pembangunan tersebut akan dilaksanakan dan syukur Alhamdulillah bermanfaat bagi kami anggota masyarakat”.

Dari beberapa hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan, Peneliti menemukan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat dan perhatian terhadap Pengelolaan Dana Desa, serta kurangnya pemahaman dari pihak pemerintah desa dalam masyarakat mengenai tahapan perencanaan pembangunan dalam Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Buntuna.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa walaupun pada akhirnya penyusunan rencana kegiatan Pengelolaan Dana Desa yang tertuang dalam DURK dapat terselesaikan dengan baik. Namun rencana yang dihasilkan tidak berdasarkan aspirasi seluruh masyarakat serta kurangnya sosialisasi informasi dari pemerintah desa, maka dapat dikatakan bahwa tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Buntuna Kecamatan Baolan masih kurang baik.

#### **Tahap pelaksanaan pengelolaan desa**

Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik, dengan anggaran Dana Desa di Desa Buntuna didasarkan pada peraturan Bupati Tolitoli No. 5 tahun 2017 tentang pengelolaan dana desa. Dana Desa di peruntukan untuk pelaksanaan fisik berupa infrastruktur fasilitas penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan tersebut tentang penetapan besaran Dana De-

sa minimum dan Alokasi Dana Desa proporsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Tolitoli Tahun anggaran 2017 besaran Dana Desa yang diperoleh Desa Buntuna adalah sebesar Rp.807.879.000,-(delapan ratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan alokasi dana desa sebesar Rp.642.652.500,- (enam ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh dua lima ratus rupiah). Adapun terkait efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Buntuna dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2  
Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2017 Dalam Pembangunan Fisik

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Pembangunan fisik Desa	Jalan rabat beton 88 meter	13.256.400	2,00
	Jalan rabat beton 40 meter	6.073.300	1,00
	Plat deker ogomoumut	6.790.700	1,00
	Jalan pemukiman dusun Taupa 400 meter	61.925.000	8,00
	Jalan pemukiman dusun Tamadayo 300 meter	20.007.700	3,00
	Pemasangan lampu penerangan jalan	13.500.000	2,00
	Drainase satu 30 m	12.978.300	2,00
	Drainase dua 150 m	57.481.600	8,00
	Posyandu	43.566.000	6,00
	Pagar dan air bersih	30.783.300	4,00
	Pembuatan sekretariat Bumdes	197.974.120	25,00
<b>Total</b>		<b>464.336.420</b>	<b>62 %</b>

Sumber: Desa Buntuna

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Dana Desa yang diterima oleh desa buntuna tahun 2017 adalah sebesar Rp.807.879.000,- dimana pengalokasian anggaran Dana Desa oleh pemerintah Desa Buntuna diperuntukkan untuk pembangunan fisik desa dengan jenis 11 kegiatan yakni, pembangunan sekretariat Bumdes, pembangunan pagar dan air bersih, pembangunan Jalan rabat beton pembangunan plat deker, pembangunan jalan pemukiman, pemasangan lampu, pembangunan drainase, dan pembangunan posyandu membutuhkan total anggaran sebesar Rp.464.336.420,- atau sebesar 62 % dari

total dana desa, dimana sisa dari dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan non fisik dan pemberdayaan.

Informasi yang diperoleh dari 29 responden terkait tahapan pelaksanaan dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Buntuna bahwa tingkat partisipasi dari setiap tahapan Pengelolaan Dana Desa sudah cukup baik, berbeda dalam proses perencanaan, dalam proses pelaksanaan masyarakat dan aparat pemerintah desa berperan aktif baik dalam bentuk tenaga ataupun materi dalam mendukung kegiatan pembangunan di Desa. Hal ini terlihat dalam proses kegiatan pembangunan yang ada di Desa Buntuna yaitu pembangunan jalan, pembangunan drainase dan seluruh pembangunan fisik yang dilaksanakan para masyarakat sangat antusias membantu dalam setiap pengerjaannya. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Eman Wahyudi yang menyatakan bahwa: "Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan sangat baik, karena kalau bukan kita siapa lagi yang membantu pemerintah desa, sebab fasilitas ini kitalah sebagai masyarakat yang menikmatinya".

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat dalam proses pengelolaan berbeda dengan pada saat proses perencanaan, pada proses perencanaan beberapa jenis dan usulan kegiatan yang di lakukan adalah berdasarkan pada kebutuhan masyarakat akan tetapi prosesnya yang tidak diikuti oleh seluruh anggota masyarakat, karena hanya melibatkan tokoh tokoh tertentu saja. Sehingga dalam pelaksanaan rencana kegiatan awal pemerintah desa kesulitan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, akan tetapi setelah proses tersebut berlangsung baru kemudian masyarakat berbondong bondong menyambut pembangunan tersebut dan ikut berpartisipasi dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya masyarakat memang lebih aktif dalam bentuk kegiatan nyata dalam pembangunan fisik karena merasa bahwa apa yang akan dilakukan adalah fasilitas yang mereka nikmati.. Hal ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat , yaitu Bapak Bahtiar yang menyatakan bahwa:

"masyarakat desa Buntuna ini memiliki beragam aktifitas dalam kesehariannya,

sehingga pada rapat-rapat usulan kita hanya mempercayakan pada tokoh-tokoh tertentu, jadi untuk jenis program kegiatan memang kita tidak tahu menahu, ada sebagian masyarakat yang tau, dan ada pula yang tidak karena kesibukan pribadi. Akan tetapi pada saat proses pengelolaan kegiatan berlangsung kita mensupport dan mendukung penuh untuk berpartisipasi dan membantu pemerintah desa, bahkan kita semangat untuk berkumpul, kita percaya bahwa pemerintah desa melakukan hal terbaik untuk masyarakat. Dan apa yang dibangun di desa adalah untuk masyarakat.”.

Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa Di Desa Buntuna ini, dari 29 responden yang kami wawancarai rata-rata tidak mengetahui seluruhnya kegiatan yang dilaksanakan, jumlah anggaran yang dibutuhkan pun tidak diketahui secara langsung oleh masyarakat. Berikut pernyataan masyarakat terkait kualitas penyelenggaraan pemerintah desa, dalam pengelolaan dana dan kegiatan. Salah satunya ibu Susanti selaku tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa: “Banyaknya anggaran yang digunakan untuk operasional kegiatan pembangunan di desa tidak kami ketahui dengan jelas pak, akan tetapi anggaran tersebut sy rasa digunakan sesuai pada tempatnya karena banyak sekali pembangunan fisik yang ada di desa kami dan kami merasakannya. Tapi untuk transparansi anggaran kami tidak tahu.”.

Melihat berbagai masalah di atas, semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. sehingga tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Buntuna dapat dikatakan efektif karena melibatkan dan mampu menggerakkan masyarakat.

**Tahapan pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa**

Tahapan penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Butuna Kecamatan Baolan, dalam tahapan pertanggungjawaban ini kurang efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) yang di susun oleh

pemerintah desa, tidak ada transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan dalam Pengelolaan Dana Desa

Tabel 3

Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD

Variable	Indikator	Ukuran	Partisipasi (Orang)	Persentase (%)
Pertanggung jawaban	Pihak Penyusunan LPJ	Pemerintah desa bersama tokoh masyarakat	12	41,38
		Tidak tahu	17	58,62
		<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>100</b>
	Evaluasi kegiatan bersama masyarakat	Ada	5	17,24
		Tidak ada	10	34,48
		Tidak tahu	14	48,28
		<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>100</b>

Sumber: Desa Buntuna

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari total responden sebanyak 12 orang atau 41,38 % mengatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disusun oleh pemerintah desa bersama tokoh masyarakat yang terlibat, sedangkan 17 orang lainnya atau 58,62% tidak mengetahui siapa pihak yang menyusun laporan pertanggungjawaban Desa Buntuna tersebut. Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Dana Desa ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam tahapan pertanggungjawaban hendaknya pemerintah tidak hanya melakukan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten, melainkan juga pada masyarakat guna memberikan informasi dan mengevaluasi kegiatan pembangunan fisik yang terjadi di Desa.

Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Buntuna tidak melakukan evaluasi kegiatan pembangunan yang berjalan di desa dengan masyarakat Desa Buntuna. Dari 29 responden hanya ada 5 orang responden atau 17,24 % yang mengatakan bahwa ada evaluasi kegiatan bersama masyarakat Desa Buntuna dan sebanyak 10 orang re-

sponden atau 34,48% mengatakan bahwa pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat, adapun 14 orang lainnya mengatakan tidak tahu apakah pemerintah desa sudah melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah berjalan atau tidak.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat, yaitu Bapak Setiadi yang menyatakan bahwa: "Pemerintah Desa Buntuna tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat yang ada di Desa Buntuna ini, sehingga masyarakat sama sekali tidak tahu apakah ada permasalahan di desa atau tidak". Hasil wawancara diatas senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat lainnya, yaitu Ibu Sriwati yang menyatakan bahwa: "Yang saya ketahui pemerintah desa tidak pernah melakukan pertanggung jawaban di hadapan masyarakat Desa Buntuna ataupun sosialisasi untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di Desa Buntunao ini".

Berdasarkan informasi yang diperoleh seperti penjelasan di atas, maka walaupun secara Administrasi tahapan pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa Buntuna dapat diselesaikan dengan baik. Namun karena LPJ yang dihasilkan tidak di evaluasi bersama masyarakat maka, kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Buntuna namun pemerintah desa tidak melakukan evaluasi kegiatan bersama masyarakat desa. Maka tahapan peertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Buntuna dapat dikatakan kuarang efektif.

## **2. Faktor-faktor yang Menghambat Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli**

Faktor-faktor yang menghambat pemerintah Desa Buntuna dalam pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah Desa Buntuna sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan dana desa, sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan pengelolaan dana desa

dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Buntuna Kecamatan Baolan. Baik Pemerintah Desa Buntuna maupun masyarakat desa mengemukakan berbagai faktor yang menjadi penghambat yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Buntuna adalah sebagai berikut:

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam mengelola alokasi dana desa yang di peroleh dari APBdesa. Hasil wawancara dengan Ibu tryana Sebagai Kepala Desa Buntuna. "Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah di pemerintah desa Buntuna sangat berpengaruh dengan perencanaan yang akan dilaksanakan sehingga diperlukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di aparat pemerintah desa agar aparat pemerintah desa dapat meningkatkan keahlian dibidang masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan yang aparat desa miliki khususnya dibidang Pembangunan Fisik".

Hasil wawancara diatas senada dengan bapak Muh Irwan. R sebagai Sekretaris Desa Buntuna menyatakan bahwa: "Kualitas sumber daya manusia di Desa Buntuna sebagai faktor internal pada umumnya tergolong sangat rendah, yang disebabkan oleh pendidikan dari aparat pemerintah desa yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembanguna fisik Di Desa Buntuna Kecamatan Baolan ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Buntuna masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa

Buntuna maupun tokoh masyarakat yang terlibat secara langsung.

## 2. Informasi

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan Dana Desa masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal Anggaran Dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Dana Desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Dana Desa tersebut.

Selain itu, Pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui proses sosialisasi. Informasi yang di peroleh melalui sosialisai yang di adakan pemerintah Desa Buntuna dalam proses Pengelolaan Dana Desa belum cukup baik. Dimana dari 29 responden, semuanya sependapat bahwa sosialisasi Pengelolaan Dana Desa dari pemerintah Kabupaten dan Kecamatan hanya sampai pada pemerintah desa selaku pelaksana Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan kepada masyarakat tidak ada pelaksanaan sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan. Berikut pernyataan yang di sampaikan oleh salah satu anggota masyarakat, yaitu Bapak Bustamin yang mengemukakan bahwa: "Tidak pernah ada sosialisasi resmi kepada kami terkait Pengelolaan alokasi danadesa sebelumnya, jika memang ada pasti hanya bersifat perorangan karena saya pribadi tidak pernah mendapat informasi. Pada saat musrembang di adakan oleh pemerintah desa itu hanya jumlah anggaran yang disebutkan, terkait penggunaan anggaran itu tidak di jelaskan".

Pendapat lain juga dikemukakan oleh salah satu masyarakat terkait kurangnya informasi dari pihak pemerintah desa yakni Bapak Ashari yang menyatakan bahwa: "Kami sebagai masyarakat tidak tahu mengenai tugas dantanggungjawab kami dalam setiap ada pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, karena kami tidak perna mendapatkan sosialisasi dari pemerintah Kabupaten/Kota bahkan dari pemerintah desa kami tidak pernah

mendapatkan informasi mengenai setiap penggunaan anggaran ataupun kegiatan yang akan dilakukan di desa".

Dari hasil penelitian bahwa kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di desa.

## PEMBAHASAN

### 1. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Buntuna

Terkait proses Pengelolaan Dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Buntuna kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, Pemerintah Desa Buntunao terlebih dahulu menyusun tim pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Selanjutnya, proses pengelolaan dana desa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan Pengelolaan Dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Buntuna kurang efektif dimana dilakukan dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran DD serta bagaimana proses pengelolaan DD, dimana dalam tahapan perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa.

Selain itu, dalam tahapan perencanaan Pengelolaan Dana Desa menunjukkan bahwa masih kurangnya

partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses Pengelolaan Dana Desa, serta dalam proses musrembang pada tahapan perencanaan ini kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses Pengelolaan Dana Desa.

Selain begitu banyaknya aspirasi, kegagalan dalam tahapan perencanaan terlihat dari menggelembungnya dana pelaksanaan program desa lainnya yang kemudian menghapus program kerja lainnya yang telah direncanakan seperti yang terjadi pada program kerja pemilihan kepala desa dengan program kerja perjalanan dinas luar daerah sekretaris desa. Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan DD di Desa Buntuna, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Buntuna ini, dari setiap pembangunan desa yang dilakukan terselesaikan dengan baik dikarenakan bersinerginya dan bekerja samanya pemerintah desa dan masyarakat sangat baik dalam pengelolaannya, sehingga pencapaian tujuan Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Buntuna cukup efektif. Dengan demikian tahapan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Buntuna berjalan dengan baik, akan tetapi walaupun proses pembagunan berjalan dengan baik namun tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa.

Selanjutnya, tahapan pertanggungjawaban Pengelolaan dana Desa di Desa Buntuna, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pertanggungjawaban kurang

efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tidak dilakukan evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Buntuna. Maka tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Buntuna dapat dikatakan kurang efektif.

## **2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli**

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Desa Buntuna dalam proses Pengelolaan Dana desa dalam meningkatkan pembagunan fisik di Desa Buntuna yaitu sebagai berikut:

### **1. Sumber Daya Manusia,**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, bahwa faktor penghambat dalam Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Buntuna Kecamatan Baolan ini yaitu Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, dimana kondisi Sumber Daya Manusia Pelaksana Pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Buntuna masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar kompetensi, baik dari kualitas pendidikan ataupun pengalaman kerja yang dimiliki perangkat Desa Buntuna.

### **2. Informasi**

Dari hasil penelitian salah satu faktor penghambat Pengelolaan Dana Desa adalah kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam Pengelolaan Dana Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah telaksananya pembangunan yang ada di Desa.

Informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang jelas. Selain tidak pernah melakukan sosialisasi sebelumnya, dalam tahapan musrembang desa pemerintah desa juga hanya sekedar menyebutkan nominal dana Desa yang diperoleh. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan tujuan Pengelolaan Dana Desa, bagaimana penggunaan anggaran tersebut, atau bagaimana peran masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Dana Desa tersebut.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, dimana dalam proses Pengelolaan Dana Desa ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Buntuna kepada masyarakat Desa Buntuna. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian cukup efektif, dimana penggunaan anggaran Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik sedangkan pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Buntuna masih kurang efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban tidak diketahui oleh masyarakat dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa

Buntuna. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

2. Faktor-faktor penghambat efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Buntuna yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan Informasi.

### SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, dalam proses Pengelolaan Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dalam melakukan kegiatan musrembang, seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Buntuna kepada masyarakat Desa Buntuna. Kemudian pada tahap pelaksanaan perlunya aparat Pemerintah Desa Buntuna melakukan transparansi penggunaan anggaran Dana Desa agar seluruh masyarakat mengetahui pengalokasian Dana Desa sesuai yang di harapkan. Selanjutnya proses pertanggungjawaban harus dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Buntuna dan disampaikan serta perlu dilakukan evaluasi masyarakat dalam setiap proses pengelolaan Dana Desa.

2. Sebagai Pemerintah Desa Buntuna Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola Dana Desa. Kemudian perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sehingga

dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dapat mencapai tujuan dari Dana Desa.

**DAFTAR PUSAKA**

Aldy, Riko. 2012, Tinjauan Yuridis Efektifitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011.

Danu Wisakti, Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, Magister Ilmu Administrasi Negara, UN-DIP, 2008.

Fattah, Nanang.(2013). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung :Remaja RosdaKarya

Haris, Dian Rasdianah, 2015. Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Halu Oleo.

Hargono, DS. 2010.Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali.

Hernowo, Basah. 2010 Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan .Dalam [www.Bappenas.go.id](http://www.Bappenas.go.id).

[Http://www.Landasanteori.com/2015/07.Pengertian Anggaran Menurut Definisi.html](http://www.Landasanteori.com/2015/07.Pengertian-Anggaran-Menurut-Definisi.html).Diakses pada maret 2017

Mardiasmo, 2004.Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta, Andi

Muljana, B.S. Perencanaan Pembangunan Nasional, Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dengan Fokus Repelita V. Jakarta: UI-Press. 2001

Muntahanah,Siti.Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.jurnal ekonomi.

Ndraha, Taliziduhu, 2004, Dimensi-Dimensi PemerintahanD esa, Jakarta : PT. Bina Aksara.

Peraturan Bupati Kabupaten Tolitoli No. 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muna

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prasetyanto PP ,Eko. 2012. Dampak Alokasi Dana Desa Pada Era Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian Daerah di Indonesia.Disertasi. IPB, Bogor.

Raum Abu, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisk Desa Krayan Makmur. E journal ilmu pemerintahan 2015 : 3 (4) 1623- 1636,di akses pada 1 mei 2016.

Saputra I Wayan .2014.Efektivitas Pengelolaan alokasi dana DesaPada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.Jurnal Pendidikan Ekonomi Sujarto, Djoko. 1986. Perencanaan Kota. Bandung, Penerbit ITB.

Sukanto,Azwardi.2014.Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.Journal Economic Development.

- Suksesi.2007.Efektifitas Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Perekonomian Desa di Kabupaten Pacitan.Dikutip dalam <http://journalfe.unitomo.ac.id./wp>
- Sumiati. 2014. Pengelolaan Alokasi Dana desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biro-maru Kabupaten Sigi.Diakses Pada 13 mei 2016
- Suparno, A.Suhaenah. 2001.Pembangunan Desa.Jakarta Erlangga.
- Suwandi, Ari Warokka. 2013. Fiscal Decentralization And Special Local Autonomy: Evidence From An Emerging Market.Journal of Southeast Asian Research.Vol.2013 (2013).IBIMA Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun1999 Tentang Pemerintahan Desa
- Welsch, Hilton, Gordon. 2000. Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba. Diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy Warouw.Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.
- Widjaja, HAW.(2001). Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah daerah.